

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu kategori sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Industri barang konsumsi diprediksi akan membaik kondisinya. Hal ini terlihat semakin menjamurnya industri barang konsumsi di negara ini khususnya semenjak memasuki krisis berkepanjangan. Kondisi ini membuat persaingan semakin ketat sehingga para manajer perusahaan berlomba-lomba mencari investor untuk menginvestasikan dananya di perusahaan barang konsumsi tersebut.

Laba merupakan informasi yang mempunyai peran penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Penilaian kinerja sebuah perusahaan dapat tercermin dari pencapaian laba perusahaan tersebut. Laba sering digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal maupun internal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait bonus, kompensasi, tolak ukur prestasi maupun kinerja pihak manajemen serta sebagai dasar penentuan besaran pajak. Oleh karena itu, kualitas informasi tentang laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi, dan pemerintah dalam

hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan kini dituntut dapat mengelola keuangan dengan baik, tidak hanya dari kualitas dan kuantitas pengelolaan produk yang ditawarkan saja. Oleh karena itu, pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan secara langsung tentu ingin memperoleh laba yang tinggi. Hal ini berpengaruh dalam menghadapi persaingan yang ketat untuk dapat bertahan dalam pasar global. Kondisi ini yang membuat manajer untuk melakukan perilaku yang menyimpang dalam menyajikan dan melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen laba (*earning manajemen*). Berbagai upaya dapat dilakukan perusahaan untuk mengelabui *stakeholder* atas informasi laba yang dilaporkan perusahaan, upaya perusahaan untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Untuk setiap perusahaan di Indonesia dalam membuat laporan keuangan diharuskan sesuai dengan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan informatif. Selain itu, perusahaan juga menyusun laporan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. Dengan adanya perbedaan penyusunan laporan laba rugi antara aturan PSAK dan peraturan perpajakan menimbulkan nilai laba yang berbeda.

Manajemen Laba yang ingin mengetahui kinerja perusahaan (Sulistyanto, 2008) merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi – informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder*. Praktik manajemen laba dalam perusahaan merupakan hal yang logis karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan. (Negara & Suputra, 2017) menyatakan konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yakni teori yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*), konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. Menurut (Aditama, 2016), manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait. (Aditama & Purwaningsih, 2014), manajemen laba dapat diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur manajemen.

Laba dengan pendekatan distribusi laba yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. *Philips, et al* 2003 dalam jurnal (Aditama & Purwaningsih, 2014) menggunakan titik

perubahan laba nol untuk mengetahui indikasi praktik manajemen laba.

Adapun manajemen laba dipengaruhi oleh perencanaan pajak (*tax planning*) Aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan karena adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, sehingga mempengaruhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbangny saldo akhir. Oleh karena itu, perlu penyesuaian saldo antara laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Menurut (Negara & Suputra, 2017) dimana semakin tinggi perencanaan pajak maka peluang perusahaan melakukan manajemen laba semakin besar dan semakin tinggi nilai beban pajak tangguhan akan mengakibatkan profitabilitas perusahaan yang melakukan manajemen laba juga semakin tinggi.

UU No. 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya. Perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2016). Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin, karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan

kembali. Menurut (Suandy, 2016), upaya untuk meminimalkan beban pajak secara eufimisme ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal dalam koridor undang – undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (Negara & Suputra, 2017). Menurut (Aditama & Purwaningsih, 2014) perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) karena dapat digunakan untuk menganalisa ukuran perencanaan pajak. Menurut *Wild et al, (2004)* dalam (Aditama & Purwaningsih, 2014) *Tax retention rate* (tingkat retensi pajak) dapat dikatakan sebagai suatu alat dengan fungsi untuk menganalisa suatu ukuran dari tingkat efektifitas manajemen pajak yang dilakukan pada laporan keuangan tahun berjalan *Wild et al, 2004* . Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak.

Pajak tangguhan (*deferred tax*) adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang (Murhaban, 2003:66). Pengakuan Pajak Tangguhan (*deferred tax*) dalam laporan keuangan perusahaan adalah satu hal yang relatif baru dalam dunia akuntansi di Indonesia. Walaupun opsi penerapan pajak tangguhan dalam Akuntansi Pajak Penghasilan

telah diperkenankan, akan tetapi masih banyak yang kurang memahami tentang pajak tangguhan tersebut baik dari segi pengertian atau pemahaman konseptual maupun aplikasinya ke dalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Pemahaman masyarakat mengenai pajak tangguhan (*deferred tax*) secara umum terkesan menimbulkan keraguan, masyarakat mengartikan bahwa telah terdapat pajak yang ditangguhkan untuk dibayarkan kembali. Pemahaman masyarakat tersebut bertolak belakang dengan konsep pajak tangguhan (*deferred tax*) setelah diaplikasikan yaitu pada waktu dikenakan pajak tangguhan ternyata sama sekali tidak berkaitan dengan pembayaran pajak.

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul karena adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Beda temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan (Suandy, 2016) . Beban pajak tangguhan ini muncul karena dilakukannya koreksi fiskal, dimana terjadi koreksi negatif yaitu jumlah penghasilan berdasarkan standar akuntansi lebih besar dari jumlah penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan, serta jumlah beban berdasarkan standar akuntansi lebih kecil dari jumlah beban berdasarkan peraturan perpajakan. (Sumomba & Hutomo, 2012) dalam penelitiannya untuk mengukur beban pajak tangguhan menggunakan rumus besaran beban

pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Penelitian ini menggunakan rumus besaran beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*), karena adanya perbedaan antara laporan keuangan standar akuntansi dengan laporan keuangan perpajakan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam melakukan manajemen laba. (Anggraeni et al., 2017), perhitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau asset, hal ini dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode sebelumnya untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) dan meningkatnya jumlah beban pajak tangguhan adanya indikasi melakukan manajemen laba atas laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan data diatas juga dapat dilihat melakukan manajemen laba, hal ini disebabkan selisih laba perusahaan cenderung menurun dan tidak menunjukkan fluktuasi laba yang signifikan sehingga memungkinkan adanya perataan laba pada perusahaan. Menurut (Aditama, 2016), manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait.

Penelitian – penelitian sebelumnya tentang hubungan antara

perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan manajemen laba menghasilkan simpulan yang berbeda – beda. (Negara & Suputra, 2017) menemukan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian dari (Putra *et al.*, 2019), menyatakan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif secara simultan atau bersama – sama terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut (Enni Endriati, Hj. NurHidayati, 2015) menyatakan perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian mengenai hal ini juga pernah dilakukan oleh (Aditama & Purwaningsih, 2014) menyatakan perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil yang berbeda didapat oleh (Khotimah, 2014) yang menyatakan perencanaan pajak yang diproksikan dengan tariff pajak efektif lebih berpengaruh besar signifikan daripada perencanaan pajak yang diproksikan dengan beban pajak tangguhan dan beban pajak tangguham tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Perbedaan hasil penelitian – penelitian tentang pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba menjadi motivasi dan alasan penelitian ini. Selain itu penelitian ini memfokuskan sampel penelitian pada salah satu sektor kelompok perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesian (BEI), yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi.

Berikut ini terlampir data Laba setiap perusahaan Pada Sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

Tabel 1.1

Data Laba setiap perusahaan selama 5 tahun pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020

No	KODE	2016	2017	2018	2019	2020
1	DLTA	254.509.268.000	279.772.635.000	338.129.985.000	317.815.177.000	123.465.762.000
2	ICBP	3.631.301.000.000	3.543.173.000.000	4.658.781.000.000	5.360.029.000.000	7.418.574.000.000
3	INDF	5.266.906.000.000	5.145.063.000.000	4.961.851.000.000	5.902.729.000.000	8.752.066.000.000
4	MLBI	982.129.000.000	1.322.067.000.000	1.224.807.000.000	1.206.059.000.000	285.617.000.000
5	MYOR	1.388.676.127.665	1.630.953.830.893	1.760.434.280.304	2.039.404.206.764	2.098.168.514.645
6	SKBM	22.545.456.050	25.880.464.791	15.954.632.472	957.169.058	5.415.741.808
7	SKLT	20.646.121.074	22.970.715.348	31.954.131.252	44.943.627.900	42.520.246.722
8	STTP	174.176.717.866	216.024.079.834	255.088.886.019	482.590.522.840	628.628.879.549
9	ULTJ	709.825.635.742	711.681.000.000	701.607.000.000	1.035.865.000.000	1.109.666.000.000
10	GGRM	6.672.682.000.000	7.755.347.000.000	7.793.068.000.000	10.880.704.000.000	7.647.729.000.000
11	HMSP	12.762.229.000.000	12.670.534.000.000	13.538.418.000.000	13.721.513.000.000	8.581.378.000.000
12	WIIM	106.290.306.868	40.589.790.851	51.142.850.919	27.328.091.481	172.506.562.986
13	DVLA	152.083.400.000	162.249.293.000	200.651.968.000	221.783.249.000	162.072.984.000
14	KLBF	2.350.884.933.551	2.453.251.410.604	2.497.261.964.757	2.537.601.823.645	2.799.622.515.814
15	MERK	153.842.847.000	144.677.294.000	37.377.736.000	78.256.797.000	71.902.263.000
16	TSPC	545.493.536.262	557.339.581.996	540.378.145.887	595.154.912.874	834.369.751.682
17	KINO	181.110.153.810	109.696.001.798	150.116.045.042	515.603.339.649	113.665.219.638

Sumber : Data diolah peneliti.2021

Berdasarkan data pada tabel 1.1 pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI rata-rata semua perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020 pada semua perusahaan sektor barang konsumsi.

Dari uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari sejauh mana pengaruh Perencanaan pajak, Aktiva pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada suatu perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak, Aktiva Pajak Tangguhan, Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020”**

B. Batasan masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu hanya mencakupi pengaruh perencanaan pajak, aktiva pajak tangguhan, beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2016-2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba ?
2. Apakah aktiva pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba ?

3. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba ?
4. Apakah perencanaan pajak, aktiva pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama mempengaruhi manajemen laba ?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui pengaruh aktiva pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
3. Untuk mengetahui Apakah pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
4. Untuk mengetahui Apakah perencanaan pajak, aktiva pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama mempengaruhi manajemen laba.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi, maka penulis menguraikan dalam lima Bab dengan sistematika sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori sebagai pedoman dalam pembahasan penulisan skripsi berupa konsep konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, objek penelitian ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengambilan data serta tehnik yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab pembahasan dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dan menggunakan data yang telah diolah sesuai dengan metode penelitian yang telah diolah sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dan landasan teori yang ada.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

